

ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DALAM PERSPEKIF MEMBANGKITKAN KEARIFAN LOKAL

Fadhilah Octaviani Isa¹, Sastro Mustapa Wantu², Lucyane Djafaar³

PPKN FIS Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: fadilaoctaviani9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Tenilo, Kabupaten Gorontalo, serta meninjau sejauh mana pelibatan kearifan lokal dalam proses kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam persepsi masyarakat dan pemerintah kelurahan terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kepala kelurahan dan warga terdampak, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan publik yang diterapkan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya partisipatif. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan pemerintah kelurahan, sumber daya yang minim, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat menurunnya nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan berbasis kearifan lokal serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir secara berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan Pelayanan Publik, Penanggulangan Bencana Banjir, Kearifan Lokal, Kelurahan Tenilo.

ABSTRACT

This study aims to analyze public service policies in flood disaster management in Tenilo Village, Gorontalo Regency, and to examine the integration of local wisdom in the policy process. A qualitative approach was employed to gain in-depth insights from both community members and local government officials. Primary data were collected through direct interviews with the village head and affected residents, while secondary data were sourced from official documents and relevant literature. The results reveal that the implemented public service policies tend to be reactive and lack community participation. Key challenges include limited authority at the village level, insufficient resources, weak inter-institutional coordination, and the declining role of local wisdom. Thus, policy reform is necessary to incorporate local knowledge and enhance collaboration between the government, community, and other stakeholders. Such an approach is expected to strengthen community resilience in facing flood disasters in a more sustainable manner.

Keywords: Public service policy, Flood Disaster Management, Local Wisdom, Tenilo Village.

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, hilangnya nyawa, serta terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun oleh ulah manusia yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat secara luas. Definisi ini mencakup beragam jenis kejadian, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, Copyright (c) 2025 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan



kekeringan, hingga banjir. Penanggulangan bencana menjadi bagian dari sistem perlindungan negara terhadap warga negaranya dan memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek preventif, tanggap darurat, hingga rehabilitasi pasca-bencana (Ratnaningsih et al., 2023). Dengan meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi semakin penting.

Salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi dan berdampak luas di Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering, disebabkan oleh curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase, pendangkalan sungai, dan tata guna lahan yang tidak berkelanjutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir didefinisikan sebagai keadaan tergenangnya suatu wilayah oleh air dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan kerugian material dan nonmaterial. Bencana banjir tidak hanya merusak infrastruktur dan pemukiman, tetapi juga membawa dampak lanjut seperti penyebaran penyakit, terganggunya aktivitas ekonomi, dan gangguan psikososial masyarakat yang terdampak. Saragih dan Ginting (2024) menyatakan bahwa banjir berdampak signifikan pada sektor sosial ekonomi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah rentan dan berpenghasilan rendah.

Permasalahan banjir di daerah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya dalam aspek perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta edukasi kesiapsiagaan masyarakat. Banyak wilayah yang tidak memiliki sistem drainase yang memadai, atau pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Susanto (2022) menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya partisipasi masyarakat lokal menjadi kendala utama dalam upaya mitigasi banjir. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika banjir terjadi berulang kali pada wilayah yang sama tanpa adanya perubahan signifikan dalam pendekatan penanganannya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peristiwa banjir tidak hanya dari sisi dampaknya, tetapi juga dari akar penyebab dan sistem respons yang berjalan di tingkat lokal.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan kompleksitas persoalan banjir terjadi di Kelurahan Tenilo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data observasi awal tahun 2024, wilayah ini kembali mengalami banjir pada tanggal 3 Juli 2024 yang merendam sekitar 500 rumah di lima lingkungan (Lingkungan 1 sampai 5) dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Dampak dari kejadian ini tidak hanya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan infrastruktur seperti jalan dan tanggul, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat sawah-sawah yang terendam dan gagal panen. Lebih dari 50 kepala keluarga harus mengungsi ke lokasi yang aman. Wandira (2024) menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program mitigasi di tingkat lokal. Sayangnya, respon terhadap banjir di Kelurahan Tenilo belum sepenuhnya mencerminkan adanya kesiapan struktural dan kultural dalam menghadapi bencana berulang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Tenilo, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi upaya penanggulangan yang telah dilakukan serta mengkaji efektivitasnya dalam merespon dan meminimalisir dampak banjir. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap kasus ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis dan rancangan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana banjir berdasarkan perspektif pengalaman langsung informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 narasumber, yang terdiri dari kepala Kelurahan Tenilo dan warga yang sering terdampak banjir. Proses wawancara dilakukan secara bertahap pada tanggal 7, 8, dan 9 Mei 2025. Dokumentasi diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kegiatan kelurahan, serta data sekunder yang relevan dari lembaga terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan tema-tema temuan yang muncul. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 10 narasumber, yang terdiri dari kepala Kelurahan Tenilo (1 orang), serta warga masyarakat kelurahan Tenilo yang sering terdampak banjir (9 orang). Wawancara pertama di lakukan rabu, 7 Mei 2025, diikuti wawancara kedua dan ketiga pada kamis dan jumat tanggal 8 dan 9 mei 2025.

Hasil

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan publik yang di berikan pemerintah kelurahan Tenilo untuk masyarakat berjalan cenderung cukup responsif. Kegiatan pencegahan banjir seperti pengeringan anak sungai, pembangunan tanggul, dan pembersihan saluran air sering kali dilakukan secara insidental, bukan sebagai program tahunan yang terencana dan melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan generasi muda yang berada di kelurahan Tenilo.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat di simpulkan bahwa Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kelurahan, telah mengupayakan berbagai kebijakan pelayanan publik dalam rangka untuk menanggulangi dampak banjir dengan melalui surat permohonan ke balai sungai agar dapat menyetujui pembangunan drainase, perbaikan tanggul yang rusak dan pembuatan saluran air untuk mengurangi dampak bencana banjir. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan program pemerintah kelurahan Tenilo yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana dengan melalui pendekatan pelayanan publik yang efektif.

Tabel 1. Data Kejadian Banjir Di Kelurahan Tenilo (2020-2024)

No.	Tahun	Jumlah Kejadian	Rumah Terendam	Jumlah Korban Terdampak
1	2020	1	86	312 jiwa
2	2021	1	102	388 jiwa
3	2022	2 (besar)	152	538 jiwa
4	2023	1	93	305 jiwa
5	2024	2 (besar)	124	461 jiwa

Sumber: dokumen.tasi BPBD Kab. Gorontalo, data di olah (2024)

Tabel 1 menunjukkan data kejadian banjir di Kelurahan Tenilo selama periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya fluktuasi jumlah kejadian banjir setiap tahunnya, dengan intensitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan 2024, yang masing-masing

mencatat dua kali kejadian banjir besar. Jumlah rumah yang terendam dan korban terdampak pun cenderung meningkat pada tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2022, sebanyak 152 rumah terdampak dan 538 jiwa menjadi korban, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 124 rumah dan 461 jiwa terdampak banjir. Data ini menunjukkan bahwa banjir di Kelurahan Tenilo tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga semakin meluas dampaknya, baik dari segi kerusakan fisik maupun jumlah warga terdampak. Hal ini mengindikasikan pentingnya penguatan sistem mitigasi bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Tabel 2. Usulan Masyarakat terhadap Penanggulangan Banjir

Jenis Usulan	Frekuensi Disebutkan	Keterangan
Pembersihan saluran air secara rutin	46%	Termasuk kegiatan gotong royong warga
Pembangunan tanggul permanen	32%	Terutama di sekitar sungai besar
Pelatihan penanggulangan bencana	28%	Diusulkan untuk pemuda dan perangkat RT
Pembentukan komunitas siaga bencana	18%	Masih berupa ide, belum direalisasikan
Penyediaan logistik darurat dan tenda evakuasi	15%	Dikhususkan bagi kelompok rentan (anak dan lansia)

Sumber: Data hasil wawancara dengan Warga kelurahan Tenilo

Tabel 2 memuat berbagai usulan masyarakat terkait penanggulangan banjir di Kelurahan Tenilo, berdasarkan hasil wawancara dengan warga. Usulan terbanyak (46%) adalah pembersihan saluran air secara rutin, yang meliputi kegiatan gotong royong warga untuk menjaga kebersihan drainase. Usulan berikutnya adalah pembangunan tanggul permanen (32%) terutama di sekitar aliran sungai besar yang rawan meluap saat musim hujan. Pelatihan penanggulangan bencana juga disebutkan oleh 28% responden, menunjukkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya pemuda dan perangkat RT. Pembentukan komunitas siaga bencana serta penyediaan logistik darurat dan tenda evakuasi juga termasuk dalam daftar usulan, meskipun frekuensinya lebih rendah. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan inisiatif yang baik terhadap upaya mitigasi bencana, namun implementasinya masih memerlukan dukungan dari pemerintah dan instansi terkait.

Pembahasan

Kebijakan pelayanan publik terhadap penanggulangan bencana banjir merupakan serangkaian tindakan terencana yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warganya dari dampak buruk banjir, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya dituntut untuk hadir saat bencana terjadi, tetapi juga harus mampu menyusun kebijakan yang mencakup seluruh tahapan manajemen bencana: mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Dalam pandangan Rahim et al. (2023), pemerintah daerah memegang tanggung jawab krusial dalam menjalankan seluruh tahapan tersebut karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan pelayanan publik dalam penanggulangan banjir sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mengedepankan kepentingan warga, berbasis data, dan mampu membangun partisipasi aktif masyarakat.

Wilayah Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo merupakan contoh nyata bagaimana ancaman bencana banjir masih menjadi persoalan yang berulang dan menimbulkan berbagai kerugian. Setiap tahunnya, banjir menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi rumah tangga, serta terganggunya aktivitas sosial masyarakat. Pemerintah kelurahan bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi bencana ini. Langkah-langkah tersebut antara lain penyediaan fasilitas evakuasi, pembangunan tanggul dan drainase, pelatihan kebencanaan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Maulana et al. (2024), yang menekankan bahwa paradigma penanggulangan bencana berbasis tanggung jawab pemerintah daerah harus disinergikan dengan pendekatan kearifan lokal agar lebih adaptif terhadap kondisi setempat.

Kinerja pelayanan publik dalam penanggulangan banjir di Tenilo juga ditandai dengan adanya kolaborasi lintas instansi. Pemerintah Kelurahan Tenilo mengandeng Dinas PU dalam pembangunan infrastruktur fisik, BNPB untuk logistik dan pendataan kebencanaan, serta Dinas Sosial dalam penyediaan bantuan bagi korban terdampak. Tak hanya itu, penyuluhan mitigasi bencana dan pelatihan relawan juga dilakukan agar warga memiliki kesiapan menghadapi situasi darurat. Seperti diungkapkan Hasu et al. (2023), keterlibatan aktif kepala desa atau lurah sebagai pemimpin lokal sangat penting dalam memfasilitasi sinergi lintas sektor demi mempercepat respons dan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan responsif di level lokal.

Pemerintah Kelurahan Tenilo telah menyusun kebijakan strategis penanggulangan banjir yang mencakup empat tahap utama: pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Pada tahap pencegahan, dilakukan normalisasi sungai kecil dan drainase lingkungan, penegakan aturan pembangunan di sempadan sungai, serta peningkatan kesadaran warga melalui edukasi lingkungan. Strategi ini sejalan dengan temuan Taslim dan Akbar (2019), yang menekankan bahwa peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar sangat penting untuk mengurangi risiko banjir secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Auliya et al. (2024) bahwa masyarakat yang diberdayakan memiliki kapasitas mitigasi yang lebih baik terhadap bencana, terutama di wilayah rentan.

Dalam aspek kesiapsiagaan, Kelurahan Tenilo telah membentuk Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK), menyusun rencana kontinjensi, dan melakukan simulasi penanggulangan bencana yang melibatkan masyarakat dan pelajar. Kegiatan ini diperkuat dengan penyediaan logistik darurat, titik evakuasi, dan pelatihan kepada perangkat RT dan relawan muda. Seperti dikemukakan Muthmainnah (2023), kesiapsiagaan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pelatihan rutin dan akses terhadap informasi kebencanaan. Di sisi lain, Babay et al. (2022) menambahkan bahwa bentuk partisipasi seperti gotong royong dan penyuluhan sangat efektif dalam membentuk budaya siaga di tengah masyarakat desa yang sering terpapar risiko banjir.

Tahapan tanggap darurat juga mendapat perhatian serius dari pemerintah kelurahan. Posko tanggap darurat didirikan dengan cepat di titik-titik aman, koordinasi dengan BPBD dan relawan dilakukan untuk evakuasi korban dan distribusi bantuan. Kecepatan respons sangat bergantung pada akurasi data lapangan serta kesiapan logistik yang telah disiapkan sebelumnya. Menurut Mutia et al. (2024), peta risiko yang akurat dan data dampak yang terkini menjadi instrumen penting dalam memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Dukungan komunitas lokal juga memainkan peran besar dalam mempercepat proses tanggap darurat secara inklusif.

Fase pemulihan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan padat karya, pembersihan area terdampak, serta rehabilitasi rumah dan fasilitas umum. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil diperkenalkan sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang. Yunus (2013) menekankan bahwa dalam fase



ini, pembangunan karakter dan nilai-nilai sosial menjadi penting untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana berikutnya. Penelitian Wandik et al. (2025) juga menyoroti bahwa pemulihan yang berbasis masyarakat dan didukung oleh partisipasi lintas sektor jauh lebih berkelanjutan daripada pendekatan top-down semata.

Penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Kelurahan Tenilo memperlihatkan bahwa kebijakan pelayanan publik yang efektif harus menggabungkan pendekatan struktural dan kultural, berbasis data serta melibatkan masyarakat sebagai subjek utama. Sebagai contoh, pendekatan Nature-Based Solutions (NbS) dalam mitigasi banjir sebagaimana dijelaskan oleh Partarini dan Wirastri (2023), perlu mulai diperkenalkan dalam konteks lokal seperti penanaman vegetasi penahan banjir dan pelestarian daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, pemanfaatan teknologi pemetaan dan sistem informasi banjir sebagaimana disarankan oleh Isa et al. (2020) dan Somantri (2008) dapat membantu Kelurahan Tenilo dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Terakhir, untuk memperkuat pelayanan publik di sektor kebencanaan, penting bagi pemerintah daerah dan kelurahan untuk senantiasa mengkaji kebijakan yang telah diterapkan dan merespon evaluasi masyarakat. Dalam konteks ini, Rosyidah et al. (2024) menyarankan agar kebijakan publik penanggulangan banjir juga menekankan pada aspek keadilan sosial, pemerataan akses bantuan, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Dalam waktu yang bersamaan, Soleh (2022) menegaskan bahwa kerja sama pemerintah dan masyarakat harus bersifat partisipatif, konsisten, dan terbuka, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek bantuan, tetapi juga subjek utama dalam mitigasi dan penanganan bencana.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan publik terhadap penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Tenilo Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya efektif karena belum mengadopsi pendekatan yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Meskipun pemerintah Kelurahan Tenilo melakukan penyuluhan, distribusi bantuan, namun jika kurangnya integrasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menyebabkan kebijakan yang diterapkan cenderung reaktif dan administratif. Kearifan lokal yang seharusnya menjadi kekuatan sisoal budaya masyarakat dalam menghadapi bencana masih terpinggirkan dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, sangat penting mereformulasikan kembali pendekatan kebijakan penanggulangan bencana dengan mengedepankan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kearifan local guna menciptakan dan meningkatkan kembali ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir, perlu dilakukan reformulasi bijakan yang menggabungkan pengetahuan lokal, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan mendorong peran aktif warga sebagai subjek dalam proses kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, A. N., Gustian, A., & Atmaja, F. S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pendidikan Ilmu Geografi*, 9(1), 47–56. <https://doi.org/10.36706/jpig.v9i1.10628>
- Babay, A., Sugeha, R. M., & Sendow, G. M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Fraktal: Jurnal Teknik Sipil*, 4(2), 9–16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/fraktal/article/view/29879>
- Hasu, A. A., Van Gobel, L., & Antu, Y. (2023). Peran kepala desa dalam menanggulangi banjir di Desa Monas Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. *COMSERVA*:



Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2(10), 2040–2047.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.621>

Isa, M., Sumarauw, J. S., & Hendratta, L. A. (2020). Analisis debit banjir dan tinggi muka air Sungai Marisa Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Sipil Statik*, 8(4), 591–600.

Maulana, A., Rahman, A., Aulia, N. A., Nur, A., Firmansyah, M., & Gunawan, B. A. (2024). Paradigma penanggulangan bencana: Tanggung jawab pemerintah daerah dan mitigasi berbasis kearifan lokal. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 667–677. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1495>

Muthmainnah, M. (2023). Hubungan karakteristik terhadap pengetahuan mitigasi bencana banjir di Desa X. *Journal of Nursing Invention*, 4(1), 48–53. <https://doi.org/10.33859/jni.v4i1.309>

Mutia, M., Chaidar, A. N., Pratiwi, A. P., & Kresnaufal, A. (2024). Kajian risiko banjir Sungai Biyong a di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Teknik Sipil Cendekia (JTSC)*, 5(2), 1040–1056. <https://doi.org/10.51988/jtsc.v5i2.231>

Partarini, H. R., & Wirastri, R. F. (2023). Implementasi pendekatan Nature-Based Solutions dalam mitigasi banjir berbasis masyarakat. *Jurnal Arsitektur Indonesia*, 12(2), 97–107. <https://doi.org/10.25077/jai.v12n2.8692.2023>

Rahim, A., Widya, D. P., & Suryani, F. (2023). Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2160–2163. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1841>

Rosyidah, N., Putri, M. W., & Rahmad, D. (2024). Analisis kebijakan publik penanganan banjir di Surabaya Barat. *Jurnal Dinamika Kebijakan Publik*, 9(1), 12–22. <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/8784>

Soleh, M. (2022). Peran pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi banjir di Sungai Citarum Hulu. *Jurnal Penelitian Sosial Humaniora*, 6(1), 45–59. <https://jurnal.uhamka.ac.id/index.php/soshum/article/view/4378>

Somantri, L. (2008). Pemanfaatan teknik penginderaan jauh untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko banjir. *Jurnal Geografi Gea*, 8(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v8i2.1697>

Taslim, I., & Akbar, M. F. (2019). Koordinasi publik untuk pengurangan risiko bencana (PRB) banjir pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Gorontalo. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(2), 63–78. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.63-78>

Yunus, R. (2013). Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1), 67–79. <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3508>

Wandik, P., Yikwa, Y., & Oktofani, D. (2025). Mitigasi bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Jayapura: Studi kasus banjir bandang 2023. *Jurnal Media Informasi*, 9(1), 34–42. <https://ojs.ustj.ac.id/median/article/view/1470>